



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK**

**NEGARA DAN PENGUSAHA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA:
Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha
Pada Industri Tepung Terigu Nasional
(periode 1999-2008)**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Ilmu Politik
Dipertahankan di hadapan Sidang Akademik Terbuka
Senat Guru Besar Universitas Indonesia
Pada Tanggal 17 Juli 2008**

**Oleh:
Muhammad Findi Alexandi
NPM: 8903210068**

**JAKARTA
2008**

Daftar Isi

Halaman	
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Orisinalitas	vi
Lembar Persetujuan dan Pebgesahan	vii
Lembar Pengesahan Disertasi	viii
Lembar Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel dan Gambar	xvii
Daftar Singkatan	xix
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	27
D. Kerangka Teori	28
E. Alur Berfikir	56
F. Signifikansi Studi	61
G. Metode Penelitian	62
H. Sistematika Penulisan	65
BAB II. Negara dan Kapitalisme Dalam Kebijakan Industrialisasi di Indonesia	70
A. Sejarah Perkembangan Kapitalisme di Indonesia	70
B. Hubungan Birokrasi Orde Baru dengan Kapitalis Keturunan Tionghoa	73
C. Kekuatan Bisnis Indofood Sukses Makmur Dalam Industri Pangan Nasional	81
D. Krisis Eksistensi Kapitalis Politik Orde Baru	85

BAB III. Perkembangan Industri Tepung Terigu di Indonesia	88
A. Politik Intervensi Bulog Dalam Penyediaan Tepung Terigu	88
B. Peranan Produsen Tepung Terigu Dalam Kebijakan Pangan (<i>food policy</i>)	102
C. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	123
D. Keppres RI No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan	136
E. PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.....	139
F. Peraturan Menperindag No. 153 Tahun 2001tentang SNI Wajib Tepung Terigu	140
G. Peraturan Menkes No. 962 Tahun 2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu	141
H. Politik Pemberlakuan SNI Wajib Tepung Terigu.....	142
 BAB IV. Kekuatan-Kekuatan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Persaingan Usaha	146
A. Kekuatan-Kekuatan Politik Dalam Proses RUU Persaingan Usaha	148
A.1.Kekuatan Politik Pemerintah/Menperindag (<i>administrator</i>).....	152
A.2.Kekuatan Politik Pansus RUU Persaingan Usaha (<i>Party Politicians</i>) ...	153
A.3.Kekuatan Politik Bogasari Flour Mills (<i>interest group</i>)	157
B. Konflik Kepentingan Antara Pansus RUU Dengan Direksi P.T. ISM Bogasari Flour Mills	161
C. Konflik Kepentingan Antara Pansus RUU Dengan Menperindag.....	172
C. 1. Perdebatan Judul RUU	174
C. 2. Terminologi Monopoli Alamiah.....	174
C. 3. Legitimasi KPPU	175
D. Konflik Antara APTINDO dan Departemen Perindustrian	177
 BAB V. Efektivitas dan Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Mengatur Industri Tepung Tepung Nasional	181
A. Efektivitas Kebijakan Negara Dalam Mengatur Industri Tepung Terigu.....	181
A. 1. Melemahnya Kekuatan Pemerintah di Hadapan Bogasari Flour Mills.	181
A. 2. Inkonsistensi Departemen Perindustrian Dalam Mengatur Industri Tepung Terigu Nasional	182
A. 3. Efektivitas KPPU Dalam Mengendalikan Dominasi Bogasari Flour	

Mills	184
B. Reformasi Politik Dan Pemecahan Krisis Kelembagaan Era Reformasi.....	187
C. Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Terhadap Industri Tepung Terigu....	189
D. Konflik-Konflik Antarlembaga Negara Pascakebijakan Persaingan Usaha ..	194
D. 1. Konflik Antara KPPU dan Depperindag.	194
D. 2. Konflik Kepentingan Antara Bappenas Dengan Depperindag.....	195
E. Antisipasi Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Tepung Terigu.....	197
F. Pengaruh Kekuatan Politik APTINDO Terhadap Penanggunggan PPN Gandum Oleh Pemerintah.....	199
G. Reaksi Bogasari Flour Mills Atas Tuduhan Praktek Monopoli.....	203
H. Kebijakan Persaingan Usaha Sebagai Alat Politik Menuju Negara Kuat.....	209
 BAB VI. PENUTUP.....	 215
A. Kesimpulan.....	215
B. Implikasi Teoritis.....	220
 Daftar Pustaka.....	 226
 Daftar Lampiran:	
 Lampiran 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	
Lampiran 2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMORT 19 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1997	
Lampiran 3. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA	
Lampiran 4. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 323/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG	

PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01,3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA

- Lampiran 5. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/K-IND/PER/1/2008 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995) DAN REVISINYA SERTA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 323/MPP/Kep/11/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-200/Rev.1995) DAN REVISINYA
- Lampiran 6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
- Lampiran 7. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
- Lampiran 8. SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/M-IND/1/2008 PERIHAL SNI WAJIB TEPUNG TERIGU
- Lampiran 9. Surat Direktur Eksekutif APTINDO Kepada Wakil Presiden RI Ref: 0143/APT/RSL.zz/IV/08 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali PPN Impor Gandum Sebesar 10%
- Lampiran 10. Surat Direktur Eksekutif APTINDO Kepada Menteri Keuangan RI Ref: 0144/APT/RSL.zz/IV/08 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali PPN Impor Gandum Sebesar 10%
- Lampiran 11. Surat Direktur Eksekutif APTINDO Kepada Menteri Perdagangan RI Ref: 0145/APT/RSL.zz/IV/08 Perihal Bea Masuk Anti Dumping Untuk Tepung Terigu
- Lampiran 12. Direktur Industri Makanan Departemen Perindustrian Nomor 18/IAK/II/2008 Perihal Keberatan Pencabutan SNI Wajib Tepung Terigu
- Lampiran 13. Surat Ketua Asosiasi Pengusaha Gula & Terigu Indonesia No. 010/APEGTI/II/2008 Perihal APEGTI Mendukung Kebijakan Pemerintah
- Lampiran 14. Laporan Tahunan APTINDO Tahun 2007

Lampiran 15. Makalah Ancaman Krisis Pangan Mencermati Rivalitas Pangan dan Energi, Oleh Franciscus Welirang, Wakil Presiden Direktur P.T. Indofood Sukses Makmur, Tbk., Dalam Acara Dialog Pangan Mencari Solusi Ancaman Krisis Pangan, Dalam rangka Sosialisasi Indofood Riset Nugraha 2008, di UGM Yogyakarta

Lampiran 16. Laporan Tahunan 2006 P.T. Indofood Sukses Makmur, Tbk



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA

MUHAMMAD FINDI ALEXANDI.8903210068

NEGARA DAN PENGUSAHA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA:
Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha Pada Industri Tepung Terigu
Nasional (periode 1999-2008)
Rincian Disertasi, xxi, 232 halaman, 13 tabel, 6 gambar, 16 lampiran, 84
buku, 8 disertasi dan tesis, 13 situs internet, serta 9 wawancara.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan penguasaan pengelolaan komoditas tepung terigu dari negara kepada swasta pascaliberalisasi pangan, yaitu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (*political goods*), dimana harga dan ketersediaannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Negara Birokratik Otoriter dari Guillermo O'Donnel, teori Persekutuan Segitiga (*Triple Alliance Theory*) antara Negara, Burjuasi Nasional dan Modal Asing dari Peter Evans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analitis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen resmi negara seperti Undang-Undang No. 5 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan wawancara mendalam dengan anggota KPPU.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pascaliberalisasi pangan, terjadi konflik dan tarik-menarik kepentingan antarlembaga negara, yaitu antara Bappenas dengan Depperindag menyangkut penetapan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bagi tepung terigu impor. Bappenas berargumen bahwa penetapan BMAD hanya akan menguntungkan produsen dominan yaitu Bogasari Flour Mills. Sedangkan menurut pihak Depperindag, penetapan BMAD dilakukan untuk melindungi produsen beskala kecil. Selanjutnya terjadi konflik kepentingan terjadi antara KPPU dengan Depperindag menyangkut penerapan SNI

Secara Wajib Tepung Terigu. KPPU berpendapat penetapan SNI secara wajib merupakan bentuk hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi tepung terigu impor. Sedangkan menurut Depperindag, kebijakan SNI wajib pada tepung terigu ditujukan untuk menjaga kualitas tepung terigu sebagai bahan pangan.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori persekutuan segitiga antara negara dan burjuasi nasional dari Peter Evans masih berlaku dan relevan dalam pengelolaan industri tepung terigu pada era reformasi di Indonesia. Persekutuan antara Departemen Perindustrian dengan APTINDO, atau Persekutuan antara Departemen Perdagangan dengan Bogasari Flour Mills, terjadi dalam pengelolaan industri tepung terigu di Indonesia, meskipun melalui negosiasi politik dan konflik kepentingan.

Intervensi negara melalui kebijakan penerapan SNI dan BMAD, maupun penanggungan PPN impor gandum oleh Departemen Keuangan, ditujukan untuk melindungi industri tepung terigu nasional dan memperkuat program ketahanan pangan nasional. Intervensi negara dalam stabilisasi harga empat bahan pangan pokok termasuk tepung terigu, dapat dijadikan sebagai alat politik APTINDO dan Bogasari Flour Mills dalam menekan pemerintah.

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTEMEN OF POLITICAL SCIENCE
THE GRADUATE SCHOOL

MUHAMMAD FINDI ALEXANDI.8903210068

STATE AND ENTREPRENEUR IN REFORMATION ORDER IN
INDONESIA:
POLITICAL ECONOMY OF COMPETITION POLICY ON NATIONAL
WHEAT FLOUR MILLS INDUSTRY (1999-2008 PERIOD)

Content: xxi, 232 pages, 13 tables, 6 pictures, 16 appendices, 84 books, 8
disertation dan thesis, 13 websites, and 9 interviews.

ABSTRACT

This research of background by transfer of power of managing wheat flour commodities from state to corporate, from Bulog to Bogasari Flour Mills after food liberalitation. Now, wheat flour commodities just not food commodities, but as a political goods, where rate of its prices and supplies can pressure the government.

As theoretical stepping, this research use Authoritarian Bureaucratic State from Guillermo O'Donnell and Triple Alliance Theory between State, Local Capitalist and International Capitalist from Peter Evans. Research use the qualitative method, is while technique analysis the data use analytical descriptive. Technique data collecting by library studies, searching document of states like Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 about Antimonopoly or Competition Policy, Keppres No. 19 Tahun 1998 about Food Liberalitation, Regulation from Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Finance and interdepth interview with members of KPPU.

Research result indicate that after food liberalitation, there were conflicts of interest on state institution, the conflict between Bappenas with Depperindag about BMAD for wheat flour imported. Bappenas argue that BMAD just give a privilege for dominant firm like Bogasari Flour Mills. But Depperindag claimed that BMAD would protect the fringe firms. The next conflict between KPPU with Depperindag about SNI policy for wheat flour mills industries. KPPU argued SNI as a barrier to entry for wheat flour imported. But Depperindag claimed that SNI policy to wheat flour mills industries made to protect quality of wheat flour as food commodities.

Theory implication show that Triple Alliance Theory especially between State and Local Capitalist is relevan in managing wheat flour

mills industry in Indonesia. Cooperation between Departement of Industry with APTINDO, or cooperation between Departement of Trade with Bogasari Flour Mills is a real fenomena in wheat flour industry in Indonesia, although with political negotiation dan conflict of interests.

State intervention with SNI and BMAD policies, or handle of Value Added Tax policies for wheat imported by Departemen of Finance indicated to protect national wheat flour industries and support food security programe. State intervention on price stabilitation of four food commodities include wheat flour, can used as political tools by APTINDO and Bogasari Flour Mills to pressure the government.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga seluruh rangkaian studi program Doktor telah mampu diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tetap tecurah kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita sekalian.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya indikasi pengalihan penguasaan komoditas tepung terigu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills Pascaliberalisasi Pangan. Disertasi ini membahas kekuatan negara dalam mengatur pengusaha industri tepung terigu nasional. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan utama kedua setelah beras, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (*political goods*), karena harga dan ketersediannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini, sehingga lebih bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum memuaskan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A. selaku Kopromotor 1 yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis selama proses penyusunan disertasi berlangsung.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dr. Julian Aldrin Pasha, M.A. selaku Kopromotor 2, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis hingga penulisan disertasi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Chusnul Mar'iyah, M.A. yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menuntaskan disertasi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Isbodroini Suyanto, M.A. yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga terselesaikannya disertasi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Yahya Muhaimin, M.A. Di sela-sela kesibukannya sebagai Guru Besar di UGM Yogyakarta, beliau masih berkenan untuk menjadi penguji ahli dalam Prapromosi dan Promosi Doktor penulis.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Chatib Basri Kepala LPEM FEUI, dan Faisal H. Basri, S.E., M.A., anggota KPPU

periode 1999-2004 yang telah memberikan masukan yang berharga mengenai kebijakan persaingan usaha.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Sulastri Surono, Deputi Menpangan RI periode 1995-2000 dan Bustanil Arifin, S.H. Kabulog RI pada masa Orde Baru, yang telah memberikan informasi berharga mengenai pengelolaan komoditas pangan dan tepung terigu oleh pemerintah di era Orde Baru dan Reformasi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ratna Sari Loppies, Direktur Eksekutif APTINDO dan Franciscus Welirang, Vice President Director P.T. Indofood Sukses Makmur, Tbk., yang telah memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri tepung terigu nasional.

Kepada Prof. Didin Hafidhuddin, M.S., Prof. Dr. Bunasor Sanim, M.Sc., dan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, M.S., D.E.A., penulis ucapkan terimakasih atas dukungan morilnya dalam proses penyelesaian program Doktor ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Nurul Nurhandjati, S.I.P., M.Si. selaku Sekretaris PPs. Ilmu Politik UI beserta Staf Penunjang, yaitu Mas Deni, Bu Hera, Bu Romlah, Mbak Retno, Pak Biwoso dan Pak Anto yang telah membantu kelancaran penulis selama menempuh program Doktor.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Departemen Ekonomi Syariah STEI TAZKIA, dan Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan STIE Pandu Madania yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian program Doktor.

Ucapan terimakasih yang tulus, khusus penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda H. Eddy Supardi, S.H., S.I.P., M.M., dan ibunda Hj. Neneng Sumarni atas do'a dan curahan kasih sayang mereka berdua yang tak pernah terputus hingga saat ini. Penulis akan selalu mengenang dalam hati atas do'a dan curahan kasih sayang mereka berdua sampai kapanpun. Kepada Adikku Ir. Verolita Hafitri, terimakasih Kakak ucapkan atas perhatian dan dorongan semangatnya selama ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Mbak Upik.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada kedua mertua, Papa dr. H. Ramamurti Makarao, M.Kes., dan Mama Ati Atikah, yang selama ini senantiasa mendo'akan penulis supaya dapat menyelesaikan program Doktor dengan baik dan lancar.

Ucapan terimakasih, khusus penulis sampaikan kepada istri tercinta, Chandra Gita Dewayani Makarao, S.E., yang selama ini setia mendampingi penulis dalam keadaan suka dan duka. Juga kepada Anakku Muhammad Zhafran Azizy, Aby mengucapkan terimakasih. Azizy, Aby berdoa semoga kamu kelak menjadi anak yang shalih. Amin.

Kepada Embu Hj. Suparti, paman dan tante dari pihak kedua orangtua, penulis ucapkan terimakasih atas do'anya. Kepada (alm) H. Ahmad Soekarta, (alm) H. O. Soeminta, (alm) K.H. Bidin Saefudin, dan

(almh) Embu Hj. Siti Mariyam, penulis berdo'a semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kelapangan di alam kubur.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dalam menempuh program Doktor Ilmu Politik UI, yaitu Ir. Dadang Heru Kodri, M.M., Drs. Sudiman, M.P.P., Prof. Riset. Drs. Syamsudin Haris, M.Si., Dr. Lili Romli, Dr. Adi Suryanto, Drs. Ary Baenus, M.A., Drs. Thomas A. Legowo, M.A., Dra. Yunita Budi Rahman, M.Si., Dr. Fauzan Ali Rasyid, Dr. Sri Zulhariyah, Drs. Zulfikri, M.Si., dan rekan-rekan lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Ucapakan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan kepada teman-teman alumnus MPKP FEUI, yaitu kepada M. Syahrhan Bhakti, S.E., M.E., Ir. Hasbullah, M.E., Syafruddin, S.Sos. M.E., Gusti Muhammad Yoselvina Yovani, S.I.P., M.E. Ir. Fahmi Jauhari, M.E.,

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, STEI TAZKIA dan STIE Pandu Madania, khususnya kepada Angga Oktapriono, S.E., dan Saeful Bahri, yang ikut terlibat dalam persiapan promosi Doktor penulis.

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendo'akan penulis, tetapi namanya belum disebutkan satu per satu, penulis mohon maaf. Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian program Doktor.

Bogor, 12
Juli 2008

MUHAMMAD FINDI
ALEXANDI

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan sudah mengikuti ketentuan penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan terdapat penjiplakan, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi.

Nama : Muhammad Findi Alexandi
NPM : 8903210068
Hari/Tanggal Kelulusan : Kamis, 17 Juli 2008
Tempat : Gedung AJB Bumiputera FISIP UI Depok



Alexandi

Muhammad Findi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NEGARA DAN PENGUSAHA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA:
Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha
Pada Industri Tepung Terigu Nasional
(periode 1999-2008)

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Promotor:

Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A.

Kopromotor 1:

Kopromotor 2:

Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A.
M.A.

Dr. Julian Aldrin Pasha,



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Muhammad Findi Alexandi
NPM : 8903210068
Departemen : Ilmu Politik

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Politik, pada tanggal 17 Juli 2008 dan telah dinyatakan:
LULUS

Tim Penguji:

Promotor:
Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. ()
)

Ko Promotor I:
Prof. Dr. Burhan D Magenda, M.A. ()
)

Ko Promotor II:
Dr. Julian Aldrin Pasha, M.A. ()
)

Ketua Sidang:
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.A. ()
)

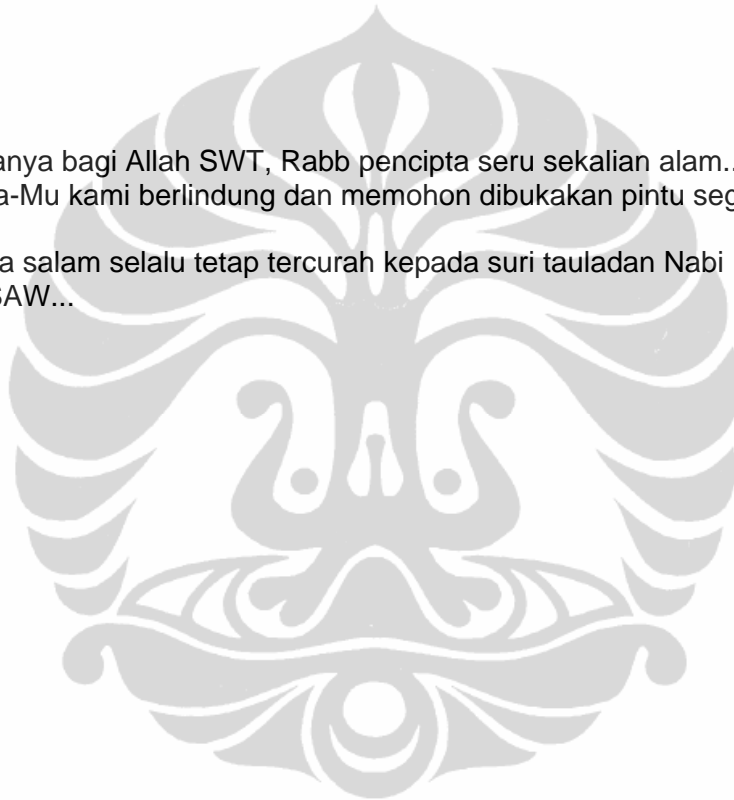
Penguji Ahli:
Prof. Dr. Yahya Muhaimin, M.A. ()
)

Penguji Anggota:
Dr. Chusnul Mar'iyah, M.A. ()
)

Penguji Anggota:
Dr. Isbodroini Suyanto, M.A. ()
)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb pencipta seru sekalian alam...
Hanya kepada-Mu kami berlindung dan memohon dibukakan pintu segala
kebaikan...
Shalawat serta salam selalu tetap tercurah kepada suri tauladan Nabi
Muhammad SAW...



Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk:
Ibunda Hj. Neneng Sumarni dan Ayahanda H. Eddy Supardi, S.H, S.I.P., M.M.,
Istriku Chandra Gita Dewayani Makarao, S.E.,
Puteraku Muhammad Zhafran Azizy, dan
Adikku Ir. Verolita Hafitri.





Daftar Singkatan



ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADB	= Asian Development Bank
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APTINDO	= Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia
AWB	= Autralian Wheat Board
Bamus	= Badan Musyawarah
Bappenas	= Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	= Bahan Bakar Minyak
BCA	= Bank Central Asia
BKPM	= Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMAD	= Bea Masuk Anti Dumping
BNPT	= Berita Negara Tambahan Perseroan Terbatas
BO	= Birokratik Otoriter
BPS	= Badan Pusat Statistik
BPUP	= Badan Pelaksana Urusan Pangan
BSN	= Badan Standarisasi Nasional
Bulog	= Badan Urusan Logistik
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
CPI	= Corruption Perceptions Index
CSIS	= Center for Strategic and Internasional Studies
CSR	= Corporate Social Responsibility
DBM	= Dewan Bahan Makanan
DJBC	= Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	= Direktorat Jenderal Pajak
Depperin	= Departemen Perindustrian
Depperindag	= Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Depkeu	= Departemen Keuangan
DIM	= Daftar Inventarisasi Masalah
Dirjen	= Direktur Jenderal

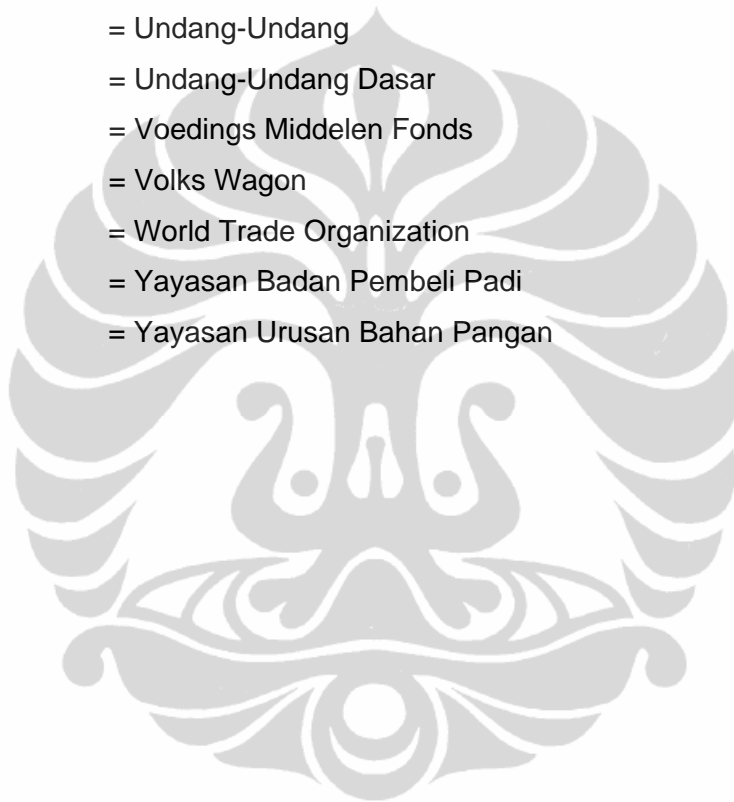
Ditjend	= Direktorat Jenderal
DNI	= Daftar Negatif Investasi
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FAO	= Food and Agriculture Organization
FABRI	= Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
FE UI	= Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
FEM IPB Bogor	= Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
FISIP UI Indonesia	= Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
FKP	= Fraksi Karya Pembangunan
FPDI	= Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
FPP	= Fraksi Persatuan Pembangunan
GATT	= General Agreement on Tarrif and Trade
GBHN	= Garis-Garis Besar Haluan Negara
GDP	= Gross Domestic Product
GNP	= Gross National Product
Golkar	= Golongan Karya
G.30.S/PKI Komunis	= Gerakan Penghianatan Tigapuluh September Partai Indonesia
HIPMI	= Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HIPPI	= Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
IAHI	= Ikatan Ahli Hukum Indonesia
ICMI	= Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IKAHH	= Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
IKM	= Industri Kecil Menengah
IMF	= International Monetary Fund
INKUD	= Induk Koperasi Unit Desa
IPO	= Initial Public Oppering
IBE	= Industri Berorientasi Ekspor
IKM	= Industri Kecil Menengah
ISI	= Industri Substitusi Impor
ISM	= Indofood Sukses Makmur

Inpres	= Instruksi Presiden
JOD	= Joint Operation Depot
JPPMB	= Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan
KADI	= Komite Anti Dumping Indonesia
Kadin	= Kamar Dagang dan Industri
KAHMI	= Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
Kasubdit	= Kepala Subdirektorat
Keppres	= Keputusan Presiden
KKN	= Korupsi Kolusi Nepotisme
KPPU	= Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kodam	= Komando Daerah Militer
Kolognas	= Komando Logistik Nasional
Kostrad	= Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KUD	= Koperasi Unit Desa
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND	= Lembaga Pemerintah Non Departemen
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
LPEM	= Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
LP3ES	= Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan
Ekonomi	dan Sosial
Mendag	= Menteri Perdagangan
Menkeu	= Menteri Keuangan
Menkokesra	= Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Menperin	= Menteri Perindustrian
Menperindag	= Menteri Perindustrian dan Perdagangan
MPR RI	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
MT	= Metric Ton
NIC	= Newly Industrializing Countries
NRP	= Nomor Registrasi Produk
Ormas	= Organisasi Masyarakat
Panja	= Panitia Kerja
Pansus	= Panitia Khusus
PDB	= Produk Domestik Bruto



PDI	= Partai Demokrasi Indonesia
Pelita	= Pembangunan Lima Tahun
Perjan	= Perusahaan Jawatan
Perpres	= Peraturan Presiden
Perum	= Perusahaan Umum
PJP	= Pembangunan Jangka Panjang
PMA	= Penanaman Modal Asing
PMR	= Pengawasan Makanan Rakyat
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri
PMR	= Pengawasan Makanan Rakyat
PNB	= Produk Nasional Bruto
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
Polri	= Kepolisian Republik Indonesia
PP	= Peraturan Pemerintah
PPh	= Pajak Penghasilan
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan
PT	= Perusahaan Terbatas
Repelita	= Rencana Pembangunan Lima Tahun
RDPU	= Rapat Dengar Pendapat Umum
RI	= Republik Indonesia
ROI	= Return of Investment
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SCP	= Structure Conduct Performance
SDM	= Sumberdaya Manusia
Setjend	= Sekretariat Jenderal
SK	= Surat Keputusan
SNI	= Standar Nasional Indonesia
SPB	= Surat Pendaftaran Barang
SPPT	= Sertifikat Produk Penggunaan Tanda
STEI	= Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
STIE	= Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Subdit	= Subdirektorat
TAP MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TI	= Tranparancy International
TNI AD	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UGM	= Universitas Gajah Mada
UI	= Universitas Indonesia
UIN	= Universitas Islam Negeri
UKM	= Usaha Kecil Menengah
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
VMF	= Voedings Middelen Fonds
VW	= Volks Wagon
WTO	= World Trade Organization
YBPP	= Yayasan Badan Pembeli Padi
YUBM	= Yayasan Urusan Bahan Pangan



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1. Pangsa Pasar Industri Tepung Terigu di Indonesia 2007.....	14
Tabel 2.1. Kelompok Usaha Keluarga Soeharto	75
Tabel 2.2. Kelompok Usaha Keluarga Soeharto	76
Tabel 2.3. Jenis-Jenis Usaha Adik Soeharto (Probosutejo)	77
Tabel 2.4. Kelompok Bisnis Ibnu Sutowo	79
Tabel 2.5. Bisnis Properti dan Konstruksi Keluarga Ibnu Sutowo	80
Tabel 2.6. Ikhtisar Keuangan P.T. Indofood Sukses Makmur Periode 2002-2006	83
Tabel 2.7. Struktur Pemegang Saham P.T. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Tahun 2006.....	85
Tabel 3.1. Kapasitas Produksi Sepuluh Produsen Tepung Terigu Tahun 2006.....	115
Tabel 3.2. Kapasitas Produksi Pabrik Tepung Terigu di Indonesia	116
Tabel 3.3. Perkembangan Konsumsi Tepung Terigu di Indonesia Selama tahun 1992 s/d 2006.....	118
Tabel 3.4. Jumlah Tenaga Kerja Produksi dan Non Produksi Th. 1998-2003 Industri Tepung Terigu di Indonesia Selama Tahun 1998 s/d 2003.....	121
Tabel 3.5. Fortifikasi Tepung Terigu di Indonesia.....	142

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Institusi, Negara dan Kinerja Industri.....	39
Gambar 1.2. The Structure-Conduct-Performance Model of Industrial Organization	49
Gambar 1.3. Alur Pemikiran Studi	59
Gambar 3.1. Transformasi Industri Tepung Terigu di Indonesia dari Orde Baru ke Era Reformasi.....	114
Gambar 3.2. Jalur Distribusi Tepung Terigu Lokal.....	122
Gambar 4.1. Pengaruh Kekuatan-Kekuatan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999)	187